

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja organisasi sektor publik sudah sering menjadi sorotan publik di era globalisasi. Masyarakat mulai mempertanyakan nilai pelayanan dan kinerja yang diberikan, apakah sumber daya yang dipakai selaras dengan yang didapat dari program yang dijalankan, dan semakin canggih dalam menilai kinerja organisasi publik. Kepercayaan publik seiring waktu mulai menurun sebab tanggung jawab atas informasi keuangan yang dilakukan didalam organisasi kurang transparan.

Ada hubungan yang signifikan dan mendasar antara hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua undang-undang yang menyediakan sumber pendanaan berlandaskan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan ini sangat mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Ada sejumlah tujuan dari tingginya permintaan akan pengukuran kinerja. Paling tidak, tujuannya adalah menaikkan akuntabilitas dan kinerja organisasi sektor publik. Organisasi di sektor publik harus bisa mengembangkan kinerja yang kuat dalam hal ini. Pengukuran yang berbeda diperlukan untuk tujuan yang berlainan sebab pengukuran kinerja disusun memakai sejumlah pengukuran.

Realitanya, masyarakat sering memandang organisasi sektor publik sebagai institusi yang berada di bawah standar, kurang produktif, memiliki kinerja yang buruk, dan hanya membuang-buang dana pajak. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat mulai menuntut sistem yang bersih. Organisasi sektor publik harus bertanggung jawab pada publik dan transparan mengingat pertumbuhan publik yang penting ini. (Listiani, 2020.)

Organisasi atau lembaga sektor publik memerlukan anggaran yang selaras dengan kebutuhan organisasi dalam melayani masyarakat agar bisa meraih tujuannya, yakni melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Anggaran yang disumbangkan ke organisasi sektor publik tidak dipakai begitu saja, tetapi juga perlu diperiksa dan dianalisis untuk mengukur seberapa baik kinerja sektor publik. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik dipakai untuk mengevaluasi seberapa akuntabel organisasi sektor publik dalam memberikan layanan masyarakat yang lebih baik. (Majid, 2019)

Tujuan akuntabilitas publik adalah untuk menilai kinerja suatu instansi pemerintah dan menentukan sejauh mana pelayanan publik sudah dijalankan. Badan publik diharapkan bisa menyusun rencana untuk menaikkan kualitas dan volume keluarannya agar bisa melayani masyarakat dengan lebih baik. Untuk mengetahui sejauh mana perbaikan kinerja sudah dijalankan, diperlukan suatu metode atau instrumen penilaian kinerja badan publik.

Fungsi khusus dimiliki oleh evaluasi kinerja. Pertama, membantu menaikkan kinerja organisasi publik. Dengan membantu organisasi agar tetap fokus pada tujuan programnya, ukuran kinerja yang dimaksud akan membantu

organisasi sektor publik memberikan pelayanan publik dengan lebih efektif dan efisien. Kedua, keputusan dan alokasi sumber daya maksud untuk pada pengukuran kinerja sektor publik. Ketiga, menaikkan organisasi kelembagaan dan meraih akuntabilitas publik.

Menguji kinerja melalui rasio ekonomi, efisiensi, dan efektivitas merupakan salah satu metode untuk melakukan pengukuran yang maksud untuk pada konsep *Value for Money*. Jika menyangkut anggaran kinerja yang terstruktur dengan baik, konsep *value for money* sebenarnya bukanlah hal baru. Saat mengevaluasi akuntabilitas organisasi sektor publik, termasuk pemerintah, pengukuran kinerja merupakan langkah penting dalam proses itu. Kemampuan untuk bertanggung jawab atas pemakaian dana publik juga memperlihatkan kemampuan untuk memakainya secara efektif, ekonomis, dan efisien.(Lombi, 2022)

Laporan realisasi anggaran bisa dipakai untuk mengetahui risiko ketidakpastian seputar sumber daya keuangan yang akan diterima untuk mendukung operasional pemerintah pusat dan daerah (Dona & Lestari, 2020). Laporan realisasi anggaran memuat informasi yang bisa dipakai untuk meninjau pilihan yang diambil perihal sumber daya keuangan, akuntabilitas, dan kepatuhan entitas terhadap pelaporan hasil anggaran. Hasil akhir yang sudah didapat kemudian akan dipindahkan ke neraca (Amanda dkk., 2021). Dengan kata lain, dengan menyajikan laporan perbandingan yang dilakukan selaras dengan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan dan selaras dengan peraturan perundang-undangan, maka

laporan realisasi anggaran bisa menentukan sejauh mana target-target yang sudah disepakati antara eksekutif dan legislatif sudah tercapai dan bagaimana penyerapan anggaran terjadi.

Laporan pemerintah daerah mengenai realisasi anggaran merupakan sumber informasi yang bagus untuk mengevaluasi kinerja keuangan. Laporan realisasi anggaran merupakan dokumen yang krusial jika dibandingkan dengan laporan keuangan lainnya. Salah satu jenis laporan keuangan daerah yang dihasilkan sebelum neraca, laporan operasional, dan laporan arus kas adalah laporan realisasi anggaran. Sehubungan dengan hal itu, Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang paling penting adalah laporan realisasi anggaran, yang bisa dimanfaatkan oleh para pengguna laporan keuangan sebagai sumber informasi analisis kinerja keuangan. (Makka dkk., 2015)

Selain mendukung DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tegal juga bertugas menangani administrasi kesekretariatan dan keuangan. DPRD juga menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD dalam menjalankan fungsinya. Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal bisa diperhatikan dari Laporan Realisasi anggaran di bawah ini:

Tabel 1. 1
Laporan Realisasi Anggaran DPRD Kabupaten Tegal
Tahun 2018-2022

No	Tahun	Anggaran	Realisasi
1	2018	52.273.824.727	47.269.485.837
2	2019	57.323.464.000	50.286.047.163
3	2020	61.694.781.568	53.218.799.922
4	2021	59.778.362.657	55.990.299.657
5	2022	60.271.421.000	58.791.418.795

Sumber: Data Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal tahun 2018-2022

Berlandaskan tabel 1.1 Anggaran dan realisasi belanja pada kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal tahun anggaran 2018-2020 secara umum bisa dikatakan sangat baik sebab anggaran meningkat pada tiap-tiap tahunnya. Dari hasil yang ditunjukkan oleh tabel diatas memaparkan bahwa kenyataannya, anggaran belanja Kantor sekretariat DPRD Kabupaten Tegal tahun 2018-2022 tidak terserap seluruhnya. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan antara jumlah aktual dan jumlah yang dianggarkan.

Berlandaskan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk menjalankan studi dengan judul “Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dengan Metode *Value For Money*”.

1.2 Perumusan Masalah

Berikut adalah masalah yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas: Bagaimanakah laporan realisasi anggaran dalam mengukur kinerja keuangan dengan pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dengan *Value for money*?

1.3 Tujuan Penelitian

Ada juga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis laporan realisasi anggaran dalam mengukur kinerja keuangan Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal.

1.4 Batasan Masalah

Penulis penelitian ini hanya fokus pada penilaian kinerja keuangan Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal selama lima tahun sebelumnya yang dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yakni Realisasi Anggaran dan Pendapatan Tahun 2018–2022 dengan menggunakan metode *Value for money*.

1.5 Manfaat Penelitian

Berikut adalah sejumlah manfaat yang penulis harapkan sesudah menjalankan studi ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti-peneliti lain yang ingin menjalankan studi terkait dan bisa memberikan sumbangan pengetahuan dan informasi, terlebih pada bidang akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dengan memakai analisis *Value for Money*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Temuan-temuan penelitian terlebih yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik diharapkan bisa memberikan manfaat untuk memperluas pengetahuan dan menjadi bahan penerapan apa yang sudah dipelajari.

b. Bagi Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal

Untuk menjamin terlaksananya program dan kegiatan yang akan datang secara ekonomis, efisien dan sukses, maka temuan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan dan saran perihampiran pengukuran kinerja pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan, khususnya bagi mahasiswa Program Studi DIV Akuntansi Sektor Publik dan bisa menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.